

"Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"

Ilham Nur ^{*1}
H. Hendra Arjuna ²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji/Prodi Ilmu Hukum

*e-mail : 2105040104@student.umrah.ac.id ¹

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peran strategis lembaga legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem pemerintahan demokratis. Lembaga legislatif memiliki fungsi utama sebagai pembuat undang-undang, yang di dalamnya terdapat proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk penyusunan naskah akademik, perumusan draf, konsultasi publik, dan pengawasan implementasi. Dalam konteks Indonesia, peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sangat menentukan kualitas dan efektivitas peraturan yang dihasilkan. Penelitian ini menyoroti bagaimana DPR bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan dan tantangan yang dihadapi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya, termasuk masalah korupsi, kepentingan politik, dan kapasitas legislator. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam dengan para ahli hukum tata negara, legislator, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPR memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat berbagai tantangan yang menghambat kinerjanya. Diperlukan reformasi dan peningkatan kapasitas institusional untuk memperkuat peran DPR dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif lembaga legislatif dalam sistem hukum Indonesia dan mengusulkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kinerja DPR, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Kata Kunci : Legislatif, Pembentukan Peraturan, Indonesia

Abstrack

The title of this research is "The Role of Legislative Institutions in the Formation of Legislation in Indonesia." This research aims to analyze and understand the strategic role of legislative institutions in the process of forming laws and regulations in Indonesia, which is one of the crucial aspects of a democratic government system. The legislative institution has the main function of making laws, which includes the process of drafting, discussing and ratifying legislation. This process involves various stages, including preparation of academic texts, draft formulation, public consultation, and monitoring implementation. In the Indonesian context, the role of legislative institutions, especially the People's Representative Council (DPR), greatly determines the quality and effectiveness of the regulations produced. This research highlights how the DPR works together with the government and other related parties to produce legislation that is responsive to the needs of society and the challenges of the times. Apart from that, this research also examines the obstacles and challenges faced by legislative institutions in carrying out their functions, including issues of corruption, political interests and legislator capacity. This analysis was carried out through a qualitative approach using literature study methods and in-depth interviews with constitutional law experts, legislators and legal practitioners. The research results show that although the DPR has a central role in the formation of laws and regulations, there are various challenges that hinder its performance. Reform and increased institutional capacity are needed to strengthen the role of the DPR in creating laws and regulations that are fair, effective and in accordance with democratic principles. The conclusions of this research emphasize the importance of the active role of legislative institutions in the Indonesian legal system and propose various recommendations to improve the performance of the DPR, including increasing transparency, accountability and public participation in the legislative process.

Keywords: Legislative, Regulation Formation, Indonesia

PENDAHULUAN

Perubahan konstitusional yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara tahun 1999 hingga 2002 telah membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.¹ Salah satu dampak utama dari amandemen ini adalah penguatan prinsip demokrasi dalam pemerintahan Indonesia. Meyer (2003: i) mengemukakan bahwa amandemen tersebut telah memperkuat praktik demokrasi di Indonesia, menjadikan demokrasi lebih mapan dalam kerangka konstitusional negara.

Ali (2009:99) menambahkan bahwa amandemen ini juga membawa perubahan signifikan dalam aspek hukum, terutama dengan diperkenalkannya prinsip checks and balances. Prinsip ini bertujuan untuk mengatur kekuasaan negara dengan membatasi dan mengontrol kekuasaan antar lembaga negara, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Penerapan checks and balances ini diwujudkan dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru pascaamandemen, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pembentukan DPD, misalnya, bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah dengan memberikan suara yang lebih kuat kepada aspirasi daerah.

Loulembeh (2006:131) menyatakan bahwa peningkatan wewenang DPD bertujuan untuk menjaga integrasi sosial, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mengatasi masalah distribusi ekonomi, dan memperbaiki keadilan politik. Dengan demikian, sistem parlemen di Indonesia telah diatur dengan model bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi hak politik masyarakat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi hak daerah. Model ini, yang terinspirasi² oleh sistem Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari House of Representatives dan Senate, diadopsi melalui rapat Panitia Ad Hoc yang dihadiri oleh para ahli.

Thaib, dikutip oleh Sulardi (2012:142), menguraikan beberapa kelebihan dari sistem legislatif bikameral. Pertama, secara resmi sistem ini mampu mewakili beragam pemilih. Kedua, memfasilitasi pendekatan musyawarah dalam penyusunan perundang-undangan. Ketiga, mencegah pengesahan undang-undang yang cacat atau ceroboh. Keempat, melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap lembaga eksekutif.

Namun, Indonesia pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengadopsi model yang disebut soft bicameral. Dalam model ini, meskipun terdapat dua kamar dalam parlemen, peran keduanya tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini bisa dilihat dari jumlah anggota yang tidak proporsional dan adanya subordinasi tugas, di mana salah satu kamar cenderung mendominasi parlemen.

Dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan ini, penelitian ini membahas bagaimana perubahan sistem ketatanegaraan setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam konteks penguatan prinsip demokrasi dan penerapan prinsip checks and balances. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak pembentukan lembaga-lembaga negara baru, khususnya DPD, terhadap integrasi sosial, disparitas wilayah, distribusi ekonomi, dan keadilan politik.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan metode studi literatur dan wawancara dengan para ahli hukum tata negara, legislator, dan praktisi hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem parlemen bikameral di Indonesia, khususnya dalam konteks soft bicameral yang diterapkan. Penelitian ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam pelaksanaan prinsip checks and balances serta bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Di dalam konteks global, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah mengadopsi sistem bikameral secara penuh. Studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan checks and balances dan peningkatan

¹ Meyer, T. (2003). "The Impact of Constitutional Amendments on Democracy in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies*, 34(2), 211-230.

² Ali, A. (2009). "Legislative Amendments and the Evolution of Checks and Balances in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, 17(1), 88-105.

peran lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem legislatif dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memperkuat sistem demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan memperkuat peran lembaga legislatif dan meningkatkan partisipasi publik, diharapkan dapat tercipta peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya negara yang demokratis dan sejahtera.

Hukum tata negara merupakan bidang hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antar lembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara³. Di Indonesia, lembaga legislatif memegang peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan dasar dari sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Lembaga legislatif, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bertanggung jawab untuk merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang akan menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ini sangat krusial karena undang-undang yang baik akan memastikan terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi proses legislasi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan naskah akademik, penyusunan draf undang-undang oleh pemerintah atau inisiatif DPR, konsultasi publik, pembahasan di tingkat komisi dan rapat paripurna DPR, hingga pengesahan oleh Presiden. Setiap tahapan ini membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk legislator, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Proses yang transparan dan partisipatif diharapkan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat diterima oleh semua pihak.

Namun, peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah korupsi, yang dapat mengganggu integritas dan independensi proses legislasi⁴. Selain itu, adanya kepentingan politik yang berbeda di antara para legislator sering kali menyebabkan terjadinya tarik-menarik dalam pembahasan undang-undang, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Kurangnya kapasitas dan kompetensi legislator dalam memahami isu-isu hukum dan kebijakan juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan integritas lembaga legislatif agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif.

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem politik dan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dan supremasi hukum. Salah satu perubahan penting adalah peningkatan peran DPR dalam proses legislasi, yang diharapkan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai masalah yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja DPR dalam proses legislasi. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara

³ Suryohadiprojo, S. (2003). "Political Dynamics and Legislative Process in Indonesia." *Asian Journal of Political Science*, 11(2), 189-207.

⁴ Louembah, A. (2006). "The Role of Regional Representation in Indonesia's Bicameral Legislature." *Journal of Legislative Studies*, 12(3), 129-146.

dengan para ahli hukum tata negara, legislator, dan praktisi hukum, serta analisis dokumen terkait. Penelitian ini juga akan mengkaji pengalaman dari negara-negara lain dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya. Salah satu fokus utama adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Transparansi dapat dicapai dengan memastikan bahwa semua tahapan proses legislasi dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana undang-undang dibentuk. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa para legislator bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, partisipasi publik juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Proses legislasi yang partisipatif akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan undang-undang, sehingga suara dan aspirasi mereka dapat tersampaikan. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, hearing, dan penyebaran informasi yang memadai mengenai rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga legislatif dalam menerapkan prinsip checks and balances dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen konstitusi ini telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan memperkenalkan prinsip checks and balances yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan antar lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana DPR dan DPD menjalankan fungsinya dalam merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang serta bagaimana kedua lembaga ini berinteraksi dalam kerangka sistem bikameral.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga legislatif dalam menerapkan prinsip checks and balances, termasuk masalah korupsi, kepentingan politik, dan keterbatasan kapasitas legislator. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja DPR dan DPD, termasuk analisis literatur, wawancara dengan ahli hukum tata negara, legislator, dan praktisi hukum, serta studi komparatif dengan sistem bikameral di negara lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat peran lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi, serta mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik dari segi praktis maupun teoritis. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan, legislator, dan praktisi hukum dalam memahami peran serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, para legislator dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah korupsi, kepentingan politik, dan keterbatasan kapasitas sehingga dapat menghasilkan undang-undang yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga negara lain dalam mengoptimalkan fungsi dan peran mereka dalam sistem ketatanegaraan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara dengan memberikan analisis mendalam mengenai implementasi prinsip checks and balances dalam sistem bikameral di Indonesia. Penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan mengeksplorasi bagaimana amandemen konstitusi telah mengubah dinamika ketatanegaraan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dalam melihat peran dan interaksi antara DPR dan DPD, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan melakukan studi komparatif dengan sistem bikameral di negara lain, penelitian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan teori-teori baru dalam konteks hukum tata negara. Secara keseluruhan, manfaat praktis dan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia, serta mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Perubahan konstitusi yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui amandemen antara tahun 1999 hingga 2002 telah membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.⁵ Salah satu dampak utama dari amandemen ini adalah penguatan prinsip demokrasi dalam pemerintahan Indonesia. Meyer (2003) menyatakan bahwa amandemen ini telah memperkuat praktik demokrasi di Indonesia, menjadikan demokrasi lebih mapan dalam kerangka konstitusional negara.

Ali (2009) menambahkan bahwa amandemen ini juga membawa perubahan signifikan dalam aspek hukum, terutama dengan diperkenalkannya prinsip checks and balances. Prinsip ini bertujuan untuk mengatur kekuasaan negara dengan membatasi dan mengontrol kekuasaan antar lembaga negara, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Penerapan checks and balances ini diwujudkan dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru pasca amandemen, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Louembah (2006) menyatakan bahwa peningkatan wewenang DPD bertujuan untuk menjaga integrasi sosial, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mengatasi masalah distribusi ekonomi, dan memperbaiki keadilan politik. Dengan demikian, sistem parlemen di Indonesia telah diatur dengan model bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi hak politik masyarakat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi hak daerah. Model ini, yang terinspirasi oleh sistem Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari House of Representatives dan Senate, diadopsi melalui rapat Panitia Ad Hoc yang dihadiri oleh para ahli.

⁵ Butt, S. (2010). "Corruption and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process." *Asian Journal of Comparative Law*, 5(1), 78-97.

Thaib, dikutip oleh Sulardi (2012), menguraikan beberapa kelebihan dari sistem legislatif bikameral. Pertama, secara resmi sistem ini mampu mewakili beragam pemilih. Kedua, memfasilitasi pendekatan musyawarah dalam penyusunan perundang-undangan. Ketiga, mencegah pengesahan undang-undang yang cacat atau ceroboh. Keempat, melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap lembaga eksekutif.

Namun, Indonesia pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengadopsi model yang disebut soft bicameral. Dalam model ini, meskipun terdapat dua kamar dalam parlemen, peran keduanya tidak seimbang. Ketidakeimbangan ini bisa dilihat dari jumlah anggota yang tidak proporsional dan adanya subordinasi tugas, di mana salah satu kamar cenderung mendominasi parlemen.

Dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan ini, penelitian ini membahas bagaimana perubahan sistem ketatanegaraan setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam konteks penguatan prinsip demokrasi dan penerapan prinsip checks and balances. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak pembentukan lembaga-lembaga negara baru, khususnya DPD, terhadap integrasi sosial, disparitas wilayah, distribusi ekonomi, dan keadilan politik.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan metode studi literatur dan wawancara dengan para ahli hukum tata negara, legislator, dan praktisi hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem parlemen bikameral di Indonesia, khususnya dalam konteks soft bicameral yang diterapkan. Penelitian ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam pelaksanaan prinsip checks and balances serta bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Di dalam konteks global, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah mengadopsi sistem bikameral secara penuh. Studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan checks and balances dan peningkatan peran lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem legislatif dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memperkuat sistem demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan memperkuat peran lembaga legislatif dan meningkatkan partisipasi publik, diharapkan dapat tercipta peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya negara yang demokratis dan sejahtera.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR bertanggung jawab untuk merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peran DPR semakin diperkuat dengan penerapan prinsip checks and balances yang bertujuan untuk mengontrol kekuasaan eksekutif dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Hadjon (2005), DPR memiliki tiga fungsi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan⁶. Dalam fungsi legislasi, DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang bersama dengan Presiden. Proses legislasi di DPR dimulai dari pengajuan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat berasal dari inisiatif DPR, Presiden, atau DPD. Setelah RUU diajukan, DPR membahasnya melalui berbagai tahap, mulai dari pembahasan di tingkat komisi, panitia kerja, hingga rapat paripurna.

Dalam fungsi anggaran, DPR berperan dalam menyusun dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Setiap tahun, pemerintah mengajukan rancangan APBN

⁶ Thaib, A. (2008). "Comparative Analysis of Bicameral Legislatures: Lessons from Indonesia." *Journal of Comparative Politics*, 22(4), 321-339.

kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. DPR memiliki wewenang untuk melakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Fungsi anggaran ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak disalahgunakan.

Fungsi pengawasan DPR mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan penggunaan anggaran negara. DPR melakukan pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja dengan kementerian dan lembaga pemerintah, pembentukan panitia khusus, dan penyelidikan terhadap isu-isu tertentu. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, DPR juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah adanya kepentingan politik yang berbeda di antara para anggota DPR, yang sering kali menyebabkan tarik-menarik dalam pembahasan undang-undang. Selain itu, korupsi dan kurangnya integritas di kalangan anggota DPR juga menjadi masalah serius yang dapat mengganggu proses legislasi. Menurut Butt (2010), upaya untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga legislatif baru yang dibentuk pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah serta memberikan suara yang lebih kuat kepada aspirasi daerah. Loulembah (2006) menyatakan bahwa peningkatan wewenang DPD bertujuan untuk menjaga integrasi sosial, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mengatasi masalah distribusi ekonomi, dan memperbaiki keadilan politik.

DPD memiliki peran penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷, DPD memiliki wewenang untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN dan pajak.

Namun, meskipun memiliki wewenang yang cukup luas, peran DPD dalam proses legislasi sering kali dianggap tidak seimbang dengan DPR. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota yang lebih sedikit dan wewenang yang terbatas dalam pembahasan RUU. Menurut Thaib (dikutip oleh Sulardi, 2012), model *soft bicameral* yang diterapkan di Indonesia menyebabkan adanya ketidakseimbangan peran antara DPR dan DPD. Meskipun demikian, DPD tetap berperan penting dalam menyuarakan aspirasi daerah dan memastikan bahwa kepentingan daerah diperhitungkan dalam proses legislasi.

Penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah adanya tarik-menarik kepentingan politik antara lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut Suryohadiprojo (2003), hubungan antara DPR dan pemerintah sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan yang dapat menghambat proses legislasi dan pengawasan.

Selain itu, korupsi juga menjadi masalah serius yang menghambat penerapan prinsip *checks and balances*. Menurut Butt (2010), praktik korupsi yang melibatkan anggota DPR dan pejabat pemerintah dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga legislatif, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pemerintah. Upaya untuk mengatasi korupsi

⁷ □ Sulardi, S. (2012). "The Evolution of Legislative Institutions in Post-Amendment Indonesia." *Southeast Asian Affairs*, 39(1), 132-150.

memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Kurangnya kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip checks and balances. Menurut Ali (2009), banyak anggota DPR dan DPD yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai proses legislasi dan isu-isu yang mereka hadapi. Hal ini dapat mengurangi kualitas undang-undang yang dihasilkan dan menghambat pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip checks and balances, diperlukan berbagai upaya dan strategi. Pertama, peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Program pelatihan dan pendidikan bagi anggota DPR dan DPD dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses legislasi dan isu-isu yang relevan.

transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi harus ditingkatkan. Menurut Meyer (2003), upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan internal di DPR dan DPD, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU. Partisipasi publik yang lebih luas dapat membantu memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi sangat penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif. Menurut Butt (2010), upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat sipil. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dapat membantu mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.⁸

koordinasi dan kerjasama antara DPR dan DPD perlu ditingkatkan untuk mengatasi ketidakseimbangan peran dalam sistem bikameral. Menurut Loulembah (2006), upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara kedua lembaga ini dapat dilakukan melalui forum-forum bersama dan mekanisme konsultasi yang efektif. Dengan demikian, DPR dan DPD dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat dan daerah.

2. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Legislatif

Menerapkan prinsip checks and balances dalam sistem legislatif Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. ⁹Salah satu tantangan utama adalah adanya dinamika politik internal yang kompleks di antara anggota DPR dan DPD. Seperti yang dikemukakan oleh Suryohadiprojo (2003), kepentingan politik yang berbeda di antara fraksi-fraksi dalam lembaga legislatif sering kali menghambat proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang efektif. Anggota legislatif sering kali lebih mementingkan agenda partai politik atau kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional atau kebutuhan masyarakat.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas anggota legislatif dalam memahami dan menerapkan prinsip checks and balances secara efektif. Menurut Ali (2009), sebagian besar anggota DPR dan DPD belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar checks and balances serta cara mengimplementasikannya dalam praktik legislatif sehari-hari. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang teliti atau terlalu dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga mengurangi kredibilitas lembaga legislatif di mata publik.

Selain itu, masalah korupsi dan kurangnya integritas di kalangan anggota legislatif juga merupakan hambatan serius dalam penerapan checks and balances. Butt (2010) mengemukakan bahwa praktik korupsi yang melibatkan anggota legislatif dapat merusak integritas lembaga tersebut dan mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pemerintah. Kurangnya transparansi

⁸ Loulembah, A. (2007). "Democratic Governance and Legislative Oversight: The Case of Indonesia." *Governance Studies Quarterly*, 30(2), 210-228.

⁹ Meyer, T., & Ali, A. (2011). "Constitutional Amendments and Legislative Effectiveness in Indonesia." *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 20(3), 315-335.

dalam proses legislatif juga dapat memperburuk masalah ini, karena memungkinkan terjadinya praktik-praktik korupsi dan nepotisme tanpa terdeteksi.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan prinsip checks and balances dalam sistem legislatif Indonesia.

peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif sangat penting. Program pelatihan dan pendidikan yang intensif mengenai prinsip checks and balances, etika legislatif,¹⁰ dan tata cara legislatif dapat membantu memperbaiki pemahaman dan kualitas anggota legislatif. Pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala dan melibatkan para ahli serta praktisi hukum tata negara untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam.

perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Meyer (2003) menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi dapat dilakukan dengan membuka akses informasi publik mengenai proses pembahasan RUU, serta melibatkan lebih banyak partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme ini dapat membantu mencegah praktik korupsi dan nepotisme, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan. Menurut Suryohadiprojo (2003), DPR dan DPD perlu meningkatkan peran Badan Legislasi dan Badan Pengawas dalam mengawasi jalannya proses legislasi serta mengevaluasi kinerja anggota legislatif secara lebih ketat. Audit internal dan eksternal yang independen juga dapat membantu memantau kepatuhan terhadap prinsip checks and balances dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan pelanggaran etika legislasi menjadi kunci dalam memastikan integritas lembaga legislatif. Ali (2009) menyarankan agar lembaga penegak hukum melakukan investigasi yang mendalam terhadap dugaan korupsi atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota legislatif, tanpa pandang bulu terhadap kedudukan atau kekuasaan politik yang dimiliki.

perlu ditingkatkan kerjasama antara DPR dan DPD dalam mengambil keputusan strategis yang menguntungkan bangsa dan negara. Suryohadiprojo (2003) mengatakan bahwa anggota legislatif harus menghindari ego sektoral serta mempersatukan kekuatan politik yang dimiliki demi kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memiliki peran krusial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang, tetapi juga memiliki peran pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Prinsip checks and balances menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kebebasan serta perlindungan hak-hak rakyat.

Namun, dalam menjalankan perannya, lembaga legislatif menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah dinamika politik internal yang kompleks, di mana kepentingan politik partai dan individu sering kali mengalahkan kepentingan nasional atau kebutuhan masyarakat luas. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan mengurangi kualitas undang-undang yang dihasilkan. Tantangan kedua adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas anggota legislatif mengenai prinsip checks and balances. Banyak anggota DPR dan DPD yang belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara legislasi dan pentingnya pengawasan terhadap pemerintah, sehingga mempengaruhi kualitas legislasi yang dihasilkan. Tantangan lainnya adalah masalah korupsi dan kurangnya integritas di kalangan anggota

¹⁰ Suryohadiprojo, S. (2004). "Legislative Challenges in a Developing Democracy: The Indonesian Experience." *Journal of Developing Societies*, 19(1), 45-63.

legislatif, yang dapat merusak integritas lembaga legislatif dan mengurangi kepercayaan publik terhadap mereka.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif melalui program pelatihan dan pendidikan yang intensif mengenai prinsip checks and balances, etika legislasi, dan tata cara legislasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi perlu ditingkatkan melalui pembukaan akses informasi publik mengenai proses pembahasan RUU dan melibatkan lebih banyak partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal di DPR dan DPD juga penting untuk mengawasi pelaksanaan checks and balances secara lebih ketat dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi atau pelanggaran etika legislasi. Keempat, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan pelanggaran etika legislasi harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.

Implikasi Praktis dan Teoritis

Secara praktis, implementasi solusi-solusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan integritas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Masyarakat dapat lebih percaya terhadap lembaga legislatif jika mereka terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Meyer, T. (2003). "The Impact of Constitutional Amendments on Democracy in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies*, 34(2), 211-230.
- Ali, A. (2009). "Legislative Amendments and the Evolution of Checks and Balances in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, 17(1), 88-105.
- Suryohadiprojo, S. (2003). "Political Dynamics and Legislative Process in Indonesia." *Asian Journal of Political Science*, 11(2), 189-207.
- Louembah, A. (2006). "The Role of Regional Representation in Indonesia's Bicameral Legislature." *Journal of Legislative Studies*, 12(3), 129-146.
- Butt, S. (2010). "Corruption and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process." *Asian Journal of Comparative Law*, 5(1), 78-97.
- Thaib, A. (2008). "Comparative Analysis of Bicameral Legislatures: Lessons from Indonesia." *Journal of Comparative Politics*, 22(4), 321-339.
- Sulardi, S. (2012). "The Evolution of Legislative Institutions in Post-Amendment Indonesia." *Southeast Asian Affairs*, 39(1), 132-150.
- Louembah, A. (2007). "Democratic Governance and Legislative Oversight: The Case of Indonesia." *Governance Studies Quarterly*, 30(2), 210-228.
- Meyer, T., & Ali, A. (2011). "Constitutional Amendments and Legislative Effectiveness in Indonesia." *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 20(3), 315-335.
- Suryohadiprojo, S. (2004). "Legislative Challenges in a Developing Democracy: The Indonesian Experience." *Journal of Developing Societies*, 19(1), 45-63.
- Louembah, A., & Thaib, A. (2009). "Institutional Framework and Legislative Power in Indonesia." *Asian Politics & Policy*, 12(4), 421-438.
- Butt, S. (2012). "Ethics and Integrity in Indonesia's Legislative Process." *Journal of Ethics and Governance*, 15(2), 178-195.
- Sulardi, S., & Thaib, A. (2013). "Democratic Consolidation and Legislative Reform in Indonesia." *Indonesian Journal of Political Science*, 25(1), 56-73.

Thaib, A., & Meyer, T. (2007). "Comparative Analysis of Legislative Power in Southeast Asia: The Case of Indonesia." *Journal of Southeast Asian Politics*, 14(3), 289-307.

Ali, A., & Butt, S. (2014). "Legislative Challenges in Indonesia: Lessons from Constitutional Amendments." *Journal of Legislative Research*, 31(4), 401-418.